

# Catatan UAT e-SPM yang perlu segera ditindaklanjuti

## E-Mail

- Dikarenakan masih menggunakan API Gmail, email token yang dikirim masih berasal dari email user yang terdaftar.
- Selain itu email terdaftar dari user harus menggunakan Gmail, karena jika tidak email berisikan token tidak bisa dikirim ke email user.

### **Solusi:**

*Akan segera menggunakan fasilitas email Kemenkeu dari Pusintek sehingga permasalahan di atas bisa segera teratasi dan aplikasi e-SPM akan lebih reliable dan professional karena menggunakan fasilitas persuratan elektronik Kementerian Keuangan sendiri (PIC : Eko Firmansyah)*

- Masih belum terfasilitasi notifikasi lewat email kepada user, mulai dari notifikasi langkah selanjutnya user ketika sudah melakukan registrasi, notifikasi apabila ada reset password, notifikasi apabila ada penolakan ADK, dsb

### **Solusi:**

*Setelah menerapkan fasilitas email Kemenkeu, akan segera dibangun fasilitas notifikasi email untuk keperluan tersebut (PIC : Eko Firmansyah)*

## Token

- Token yang dikirim melalui email masih membingungkan bagi user yang memegang beberapa satker, dikarenakan tidak ada keterangan yang menjadi dasar token tersebut dikeluarkan (nomor transaksi, kode satker, nama file, dsb)

### **Solusi:**

*Akan digunakan sistem token dikeluarkan atas dasar kode satker yang nanti akan dicantumkan di email pengiriman token, sehingga kelak bisa menjadi solusi atas user yang memegang banyak kode satker. (PIC : Eko Firmansyah)*

## Validasi

- Masih belum ada validasi minimal karakter dalam pengisian username dan password ketika melakukan registrasi. Begitu pula ketika melakukan pengisian NIP untuk user KPPN masih belum ada validasi 18 digit.

### **Solusi:**

*Akan dilakukan pembatasan minimal karakter di username sebanyak 6 karakter dan password sebanyak 8 karakter. Untuk NIP, akan segera dilakukan validasi 18 digit. (PIC : Eko Firmansyah)*

- Masih belum ada validasi atas email yang didaftarkan ke dalam e-SPM selain penempatan karakter '@' dan '.' sehingga user bisa melakukan input email secara acak dan dipertanyakan validitas email tersebut

**Solusi:**

*Untuk sementara akan ditambahkan placeholder atau pelabelan format penulisan e-mail di dalam kolom tersebut sebagai acuan penulisan e-mail yang benar. (PIC : Eko Firmansyah)*

- Disarankan untuk ditampilkan EULA (End User License Agreement) atau hak dan kewajiban user ketika melakukan registrasi dan user harus menyetujui EULA tersebut untuk bisa lanjut ke langkah berikutnya

**Solusi:**

*Untuk isi dari EULA secara rinci akan dibahas di dalam SOP, untuk sementara akan ditampilkan hak dan kewajiban dasar user ketika melakukan registrasi (PIC : Eko Firmansyah)*

## Keamanan

- Ketika user melakukan reset password, password otomatis berubah menjadi password default (p4ssw0rd!) yang di mana hal tersebut terlalu berbahaya bagi user karena password default semua user seragam. Perlu dipikirkan metode yang lebih aman untuk melakukan reset password

**Solusi:**

*Akan diberlakukan sistem pengiriman password default secara random ke email user ketika user melakukan permintaan reset password, sehingga hanya user bersangkutan yang mengetahui password default tersebut. (PIC : Eko Firmansyah)*

## User Experience

- Ada banyak ketidakjelasan instruksi dalam melakukan aksi upload, seperti ukuran maksimum file dan jenis file yang diupload.

**Solusi:**

*Akan diberikan label keterangan di setiap aksi upload tentang ekstensi file apa yang diupload dan maksimal ukuran file yang diupload. (PIC : Eko Firmansyah)*

- Tidak adanya aksi simpan ketika melakukan browsing file yang akan diupload, sehingga ketika user memilih file yang akan diupload, file tersebut langsung diupload setelah user memilih file tersebut di browser sehingga tidak ada waktu buat user untuk meneliti lagi file tersebut

**Solusi:**

*Akan ditambahkan aksi simpan setelah melakukan browsing file yang akan diupload (PIC : Eko Firmansyah)*

- Ketika melakukan pemilihan antrian berdasarkan jam, akan lebih baik kalau dimunculkan jam awal pelayanan saja sehingga user bisa lebih nyaman melihat halaman pemilihan antrian.

**Solusi:**

*Akan dilakukan penggantian tampilan dari range jam antrian menjadi cuma menampilkan jam awal antrian (PIC : Eko Firmansyah)*

- Di bagian upload SPM Koreksi, masih belum tertera informasi tentang kelengkapan dokumen yang hendaknya diupload sebagai lampiran SPM Koreksi.

**Solusi:**

*Akan dilakukan penambahan label informasi kelengkapan dokumen lampiran SPM Koreksi (PIC : Eko Firmansyah)*

- Masih banyak fitur yang belum mengakomodasi tombol upload seperti upload lampiran perubahan gaji, perubahan pegawai, dan upload foto di registrasi.

**Solusi:**

*Akan dilakukan penambahan fitur upload di menu yang sudah dimaksud di atas (PIC : Eko Firmansyah)*

- Perlu ada penggantian nama user Operator FO Bank Giro/Pos diganti dengan Operator FO Vera, dikarenakan kebutuhan LPJ yang lebih ke seksi Vera daripada Bank

**Solusi:**

*Akan dilakukan penggantian nama (PIC : Eko Firmansyah)*

- Disarankan ada aksi penyimpanan konfigurasi antrian sehingga ketika akan melakukan konfigurasi antrian, user tidak perlu melakukan perekaman antrian dari awal. User tinggal melakukan pemilihan konfigurasi yang sudah mereka simpan sebelumnya.

**Solusi:**

*Akan dilakukan aksi perekaman konfigurasi seperti itu. Kalau tidak, akan dibuat fitur autofill untuk perekaman konfigurasi antrian (PIC : Eko Firmansyah)*

## User Interface

- Ketika melakukan perekaman user untuk KPPN, seharusnya tidak perlu melakukan pemilihan KPPN, karena sudah jelas jika melakukan perekaman user KPPN harus login terlebih dahulu menggunakan user Admin KPPN bersangkutan.

**Solusi:**

*Akan segera dilakukan penghapusan pemilihan KPPN (PIC : Yuli Setyo Budi)*

- Disarankan ada aksi view untuk melihat informasi rinci user sesuai dengan informasi yang sudah diisikan ketika melakukan registrasi. Selain itu masih belum ada kolom untuk kode satker di menu monitoring user

**Solusi:**

*Akan dilakukan penambahan aksi view dan kolom kode satker di manajemen user level admin KPPN (PIC : Yuli Setyo Budi)*

- Ketika dilakukan upload ADK lebih dari satu kali dengan proses yang belum selesai (ketika ADK sudah diupload, user sadar kalau ADK yang diupload itu salah, terus user upload lagi tanpa sempat proceed ke proses berikutnya), ADK yang diupload ditampilkan banyak seolah-olah melakukan multi-upload, padahal ADK terbaru yang diupload akan menimpa ADK lama.
- Ketika melakukan upload ADK dan PDF untuk LPJ, setelah proses selesai keluar tulisan '[object][Object]'
- Ketika tayang form LPJ, keluar pesan error "Forbidden"
- Tayang PDF SK masih belum di Tab baru

**Solusi:**

*Akan dilakukan pengecekan ulang. (PIC : Eko Firmansyah)*

- Urutan jam di cetakan kode booking masih diurutkan secara terbalik
- Setelah melakukan perekaman user untuk KPPN, halaman tidak kembali ke menu referensi user, malah masih tetap di halaman rekam user tapi tanpa form.

**Solusi:**

Akan segera diperbaiki. (PIC : Yuli Setyo Budi)

## Proses Bisnis

- Diperlukan adanya fitur aksi penolakan ADK yang dilakukan oleh KPPN, sehingga bisa status penolakan kepada satker bisa lebih jelas karena setelah KPPN melakukan penolakan secara manual, mereka melakukan input alasan penolakan dan akan ditayangkan ke monitoring di e-SPM user satker

**Solusi:**

*Akan dilakukan penambahan mode tersebut (PIC : Eko Firmansyah)*

- Diperlukan adanya pemisahan folder untuk SPM penerima Bendahara/Pegawai dengan SPM penerima Pihak Ketiga/Rekanan/Bansos di FTP tujuan setelah user melakukan upload ADK.

**Solusi:**

*Akan dilakukan pemisahan folder sehingga operator KPPN menjadi lebih mudah mengenali jenis SPM yang diupload satker. (PIC : Eko Firmansyah dan Bambang Sugiarto)*

- Diperlukan adanya pemisahan SPM yang dikirim berdasarkan per-loket.

**Solusi:**

*Akan dilakukan penambahan parameter nomor loket dalam API sehingga bisa melakukan sortir berdasarkan loket (PIC : Eko Firmansyah dan Bambang Sugiarto)*

# **Poin-poin di e-SPM yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Disusun SOP dan Payung Hukumnya**

1. Diperlukan payung hukum untuk registrasi e-SPM mengingat registrasi tersebut kelak menggantikan posisi KIPS di KPPN
2. Sekaligus ada kejelasan tentang format surat penunjukan pegawai satker yang berhak mempunyai user e-SPM
3. Diperlukan payung hukum untuk dokumentasi pdf atas SPM dan lampiran-lampirannya, mengingat cara kerja KPPN yang masih melakukan penyimpanan berkas fisik SPM dan lampirannya.
4. Diperlukan penyelarasan SOP antara SPAN dengan e-SPM seperti contoh urgensi pengiriman Resume Kontrak, Karwas Kontrak, dan Realisasi Kontrak ketika melakukan pengiriman ADK Kontrak.
5. Diperlukan pembuatan EULA (End User License Agreement) yang berkekuatan mengikat tentang hak dan kewajiban user satker ketika menggunakan aplikasi e-SPM.
6. Diperlukan penegasan kewenangan KPPN secara hukum terkait aplikasi e-SPM.
7. Diperlukan SOP mengenai reset password, penonaktifan user, serta penghapusan user satker
8. Diperlukan kekuatan hukum atas token yang diterbitkan aplikasi e-SPM
9. Diperlukan SOP mengenai konfigurasi antrian dan pemilihan antrian
10. Diperlukan payung hukum untuk pengiriman SPM, mulai dari SPM Bendahara maupun SPM Pihak Ketiga